

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan andal bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah pusat, legislatif, masyarakat, dan investor. Informasi yang berkualitas ini sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi instrumen penting dalam mencerminkan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berkualitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang

transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah mempunyai tujuan baik, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Firmansyah et al., 2022).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas LKPD di beberapa daerah masih belum optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti kesalahan pencatatan, manipulasi data, hingga kurangnya transparansi dalam proses penyusunan laporan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan kelemahan sistem pengendalian internal.

Kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam menjamin keakuratan dan keandalan laporan keuangan. SDM yang kompeten memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. SDM yang kompeten akan mampu memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik, serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar

belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan baik dan benar.

Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan meningkatkan produktivitas pegawai pemerintah sehingga diharapkan kualitas kerja yang dihasilkan lebih tinggi dan berujung pada puasnya masyarakat dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang pegawai secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut (Irmawati Hamruna et al., 2022).

Transparansi merupakan salah satu ciri kualitas dan keandalan pelaporan keuangan serta penyajian yang jujur (Khikmah et al., 2024). Transparansi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Organisasi yang menerapkan prinsip transparansi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipahami.

Transparansi keuangan dapat dicapai melalui penyajian laporan keuangan yang mudah dipahami, aksesibilitas informasi yang luas, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengendalian internal yang efektif juga berperan penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pengendalian internal adalah serangkaian rencana dan metode yang diterapkan oleh organisasi untuk melindungi aset, menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi, serta mendukung kepatuhan. Pengendalian internal dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan kecurangan serta untuk melindungi dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap aset dan optimal perusahaan (Istikomaroh & Estiningrum, 2022)

Sistem pengendalian internal mengacu pada kebijakan, prosedur, dan proses yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keandalan pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah kesalahan, penipuan, dan penyimpangan lainnya dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pengendalian internal dengan baik agar potensi terjadinya kecurangan dapat dikurangi dan tujuan organisasi yang diinginkan dapat tercapai.

Aspek yang menarik dan belum banyak diteliti adalah peran kecerdasan spiritual dalam memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas laporan keuangan. Kecerdasan spiritual yang mencakup nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dapat memperkuat pengaruh kompetensi SDM, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Individu dengan kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki kesadaran etis yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kecerdasan spiritual berfungsi sebagai variabel pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara kualitas sumber daya manusia, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas lapran keuangan pemerintah daerah. Kecerdasan spiritual itu sendiri merujuk pada rasa moral dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, yang disertai dengan pemahaman yang dimiliki individu. Menurut Zahar dalam penelitian Nursin et al., (2023), kecerdasan spiritual merupakan fondasi bagi pengembangan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Keberhasilan dan kesuksesan seseorang dalam hidup sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional yang berkontribusi sebesar 80%, sementara kecerdasan intelektual hanya berperan 20%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pusat dari IQ dan EQ adalah Spirit (SQ), yang diyakini dapat menentukan tingkat kesuksesan seseorang.

Hasil penelitian Hage dan Posner yang dikutip dalam penelitian (Nursin et al., 2022) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual merupakan elemen penting dalam pembentukan pemimpin yang beretika. Kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat mengarahkan organisasi dan anggotanya pada jalur moral yang mendorong perilaku etis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Pemimpin yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi cenderung terlibat dalam perilaku yang sejalan dengan nilai, keyakinan, dan motivasi positif yang ada dalam diri mereka (Fry et al., 2010) dalam (Nursin et al., 2022).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini

menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan dengan wajar serta berkualitas. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). (Humairoh et al., n.d.).

Pemerintah daerah Kabupaten Nias, yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, harus memberikan pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari opini audit yang diberikan terhadap laporan keuangan daerah untuk tahun tertentu.

(Rahayu & Kanita, 2023) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dapat diukur melalui opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, (Putra & Halmawati, 2022) dalam penelitian mereka menegaskan bahwa opini BPK berfungsi sebagai indikator kualitas laporan keuangan untuk daerah tertentu. Oleh karena itu, semakin baik kualitas laporan keuangan, maka opini audit yang dihasilkan akan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias untuk periode 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1**Daftar Opini BPK Untuk LKPD Kabupaten Nias Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Kabupaten Nias
1	2017	WDP
2	2018	WDP
3	2019	WDP
4	2020	WDP
5	2021	WTP
6	2022	WTP
7	2023	WTP

Sumber : LHP LKPD Kabupaten Nias Tahun 2017-2023

Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias. Namun, pada tahun 2021, 2022 dan 2023, opini yang diberikan berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan adanya peningkatan dari WDP yang diterima sebelumnya yang mencerminkan adanya perbaikan dalam akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Perubahan opini dari WDP menjadi WTP inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nias dari WDP menjadi WTP.

Dari hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias selama periode 2017-2023, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah menerima opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak berarti laporan keuangan instansi tersebut bebas dari masalah dan kesalahan yang dapat mengurangi kualitas laporan keuangannya. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sistem kompetensi sumber daya manusia, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal yang diterapkan di Kabupaten Nias.

Kabupaten Nias menaungi beberapa Dinas, Badan, dan Kantor Kecamatan. Semua Dinas, Badan dan Kantor Kecamatan ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah. Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Jadi didalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah OPD yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor Kecamatan.

Berdasarkan penelusuran dari penelitian terdahulu, ditemukan bahwa hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Keberagaman hasil tersebut disebabkan oleh perbedaan variabel yang digunakan oleh masing-masing peneliti serta perbedaan konteks wilayah dan satuan kerja yang diteliti. Beberapa penelitian menggunakan variabel seperti akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, atau tanggung jawab sosial, sementara penelitian lainnya lebih fokus pada aspek kompetensi sumber daya manusia, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal.

Keberagaman hasil tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan satuan pemerintahan yang menjadi objek penelitian (misalnya desa, kecamatan, atau kabupaten), periode waktu penelitian, dan pengaruh karakteristik kultural di tiap daerah. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya menguji kembali variabel-variabel tersebut dalam konteks yang berbeda untuk memperkaya literatur dan memperkuat validitas temuan.

Dari kajian terhadap penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa keterbatasan yang menunjukkan adanya gap penelitian. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang menguji secara simultan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nias. Kedua, belum banyak penelitian yang menggunakan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kualitas laporan keuangan. Padahal, nilai-nilai spiritual seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral memiliki

potensi besar dalam memperkuat praktik akuntansi pemerintahan yang etis dan akuntabel.

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengidentifikasi dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri sejauh mana kecerdasan spiritual mampu memoderasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pengaruh Sistem Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah pada penelitian kali ini yaitu:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di beberapa daerah masih menghadapi permasalahan seperti kesalahan pencatatan, manipulasi data, dan kurangnya transparansi dalam penyusunan laporan.

2. Aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintahan.
3. Kurangnya keterbukaan dalam akses informasi dan proses pengambilan keputusan dapat mengurangi akuntabilitas laporan keuangan.
4. Sistem pengendalian internal yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan dalam laporan keuangan.
5. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana kecerdasan spiritual dapat memoderasi hubungan antara kompetensi SDM, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah pada penelitian ini memiliki batasan yaitu pada variabel dan daerah yang menjadi sampel penelitian. Topik dari penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi variabel dependen, sedangkan variabel independen penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM), transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal. Kecerdasan Spiritual digunakan sebagai variabel moderasi. Daerah yang menjadi tempat pada penelitian ini yaitu OPD kabupaten Nias.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias?
2. Apakah transparansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias?
4. Apakah kecerdasan spiritual mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias?
5. Apakah kecerdasan spiritual mampu memoderasi pengaruh transparansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias?
6. Apakah kecerdasan spiritual mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk mengetahui Peran Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan
5. Untuk mengetahui Peran Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Transparansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan
6. Untuk mengetahui Peran Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

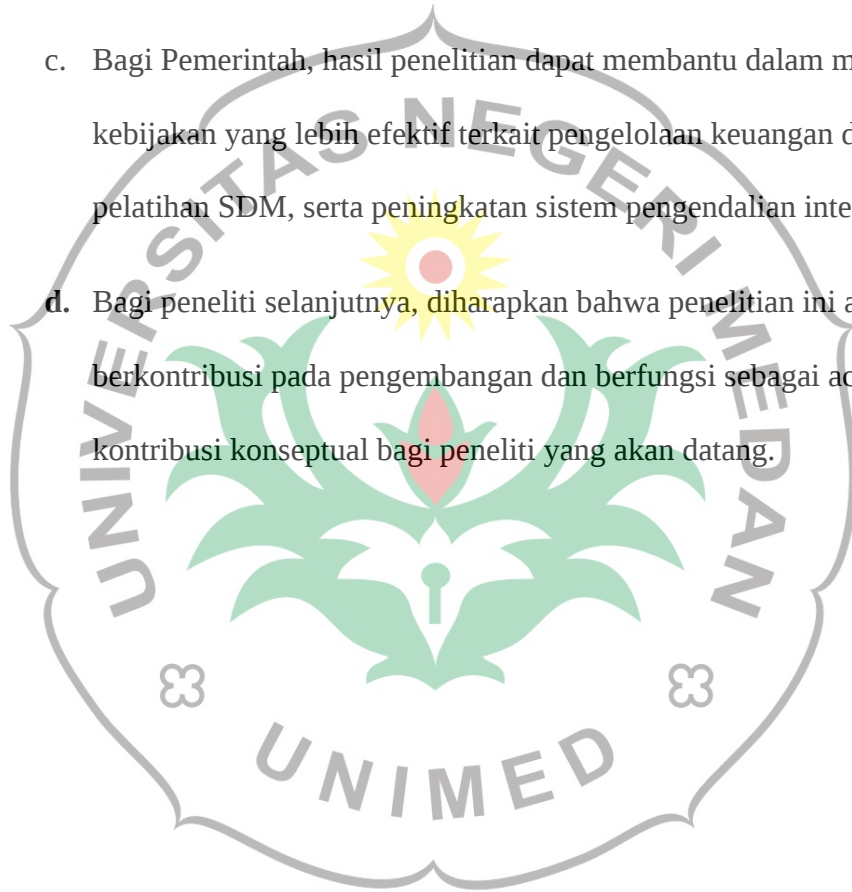
- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Memberikan wawasan baru mengenai peran kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kompetensi SDM, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya dalam aspek kualitas laporan keuangan, transparansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM serta memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan spiritual dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas laporan keuangan.
- b. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya terkait kompetensi SDM, transparansi keuangan, dan sistem pengendalian internal.

- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan keuangan daerah, pelatihan SDM, serta peningkatan sistem pengendalian internal.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan dan berfungsi sebagai acuan dan kontribusi konseptual bagi peneliti yang akan datang.



THE *Character Building*
UNIVERSITY